

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Semenjak Hugo Chavez muncul sebagai pemenang sah dalam pemilu Venezuela pada tahun 1998, dengan mengalahkan lawan-lawannya yang merupakan orang-orang yang pro-neoliberal, pro-pasar bebas, pro-Amerika Serikat. Di sisi lain rakyat semakin mengeluh-eluhkan Hugo Chavez sebagai alternatif pemimpin yang membawa angin segar perubahan dan kesejahteraan di bawah panji-panji sosialisme. Hal ini merupakan babak baru sejarah kemenangan rakyat di Venezuela.

Sikap Hugo Chavez yang anti Amerika Serikat seputar liberalisasi perdagangan dan sistem ekonomi kapilatistik yang terbungkus dalam rezim-rezim internasional seperti moneter IMF, pembangunan Bank Dunia, dan rezim perdagangan WTO. Sehingga terciptanya hubungan yang tidak harmonis antara Venezuela dengan Amerika Serikat dan negara-negara pendukungnya, terutamanya di kawasan Amerika Latin.

Kondisifitas dalam negeri Kolombia terganggu dengan adanya separatis sayap kiri FARC sejak berdiri pada tahun 1964. Masalah dalam negeri Kolombia terkait masalah sering melibatkan negara lain. Perlawanan Kolombia terhadap FARC mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat.

Kedekatan ideologi antara Hugo Chavez dengan FARC
mempengaruhi hubungan antara Venezuela dan Kolombia, hubungan kedua

negara mengalami pasang surut, salah satunya adalah perlawanan Kolombia terhadap kelompok sayap kiri FARC.

Dengan melihat uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut guna diangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **Ketegangan Politik Venezuela-Kolombia Dalam Masalah FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)**.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan ketegangan politik antara Venezuela dengan Kolombia, hingga mengapa Venezuela memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kolombia pasca serangan Tentara Kolombia ke kamp milisi sayap kiri FARC.
2. Untuk mengaplikasikan berbagai macam sisi teoritis yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.
3. Untuk memenuhi syarat mencapai gelar kesarjanaan Strata-1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara Venezuela dengan Kolombia telah berkembang sejak tahun 1500-an, ketika bangsa Spanyol telah menjajah kedua

menciptakan Provinsi Santa Marta (kini Kolombia) dan Provinsi Andalucia Baru (kini Venezuela).¹

Sejak abad ke-20 hubungan kedua negara mengalami fluktuasi. Konflik dan sengketa mewarnai hubungan kedua negara, salah satu masalah adalah terjadinya migrasi besar-besaran masyarakat Kolombia ke Venezuela pada tahun 1970-an dan 1980-an. Sejak tahun 2002, hubungan antara Kolombia dan Venezuela telah mengalami pasang-surut karena perbedaan ideologis yang memisahkan Hugo Chavez dan Alvaro Uribe.

Salah satu penyebab ketegangan politik kedua negara adalah masalah kelompok pemberontak sayap kiri Kolombia, yaitu FARC. FARC, dengan 17.500 anggota, aktif di Kolombia dan berkantor pusat di bagian selatan Kolombia. Tujuan utamanya adalah untuk menggulingkan pemerintahan dan mendirikan negara komunis-agraria.²

FARC diatur oleh sebuah sekretariat yang beranggotakan tujuh anggota, diketuai oleh pendirinya, Manuel Marulanda. Sekitar 30 persen anggota FARC adalah perempuan dan kebanyakan lebih muda dari 19 tahun. Keuangan FARC didapat melalui penculikan dan tebusan, pemerasan, dan perdagangan narkoba. Menurut analis militer, FARC menghasilkan antara \$ 250 dan \$ 300 juta melalui tindak pidana, yang 65 persen berasal dari perdagangan obat bius.³

¹“Colombia-VenezuelaRelations”,
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia%E2%80%93Venezuela_relations, diakses pada 18 Oktober 2009.

² “Colombia's Civil War Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)”,
<http://www.caspio.org/colombia/farc.html>, diakses pada 15 Agustus 2012.

Pada tahun 2004, hubungan Venezuela-Kolombia memanas dalam masalah Rodrigo Granda. Granda diculik di wilayah Venezuela dan dibawa ke perbatasan Cucuta di Kolombia, kemudian ditahan oleh Kepolisian Nasional Kolombia atas tuduhan pemberontakan. Granda merupakan juru bicara milisi sayap kiri Kolombia FARC.

Pada tahun 2007 Pemerintah Venezuela menarik duta besarnya, Pavel Rondon dari Kolombia, seiring dibekukannya hubungan dua negara terkait masalah tawanan FARC. Ketegangan Venezuela-Kolombia dipicu sikap Presiden Kolombia Alvaro Uribe yang memutuskan secara sepihak peran mediasi Chavez dengan pemberontak sayap kiri Kolombia FARC.

Presiden Uribe menuduh Chavez ingin memperkeruh situasi keamanan di Kolombia. Di pihak lain, Chavez menyebut Uribe antek Amerika Serikat. Sementara itu, pemerintah Kolombia tetap mempertahankan dubesnya di Caracas, dan menyatakan Bogota tidak punya alasan untuk menarik dubesnya dari Venezuela.

Hubungan kedua negara kembali bergejolak ketika militer Kolombia melakukan operasi militer gerakan separatis ke wilayah perbatasan Venezuela dan Ekuador, dan melanjutkan pemburuannya terhadap anggota FARC dengan memasuki wilayah Ekuador tanpa izin, yang menimbulkan reksi keras Ekuador dengan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kolombia.

Pada tanggal 01 Maret 2008, pasukan Kolombia menembak mati salah seorang pemimpin gerakan gerilya Kolombia FARC, Raul Reyes, bersama enam belas gerilyawan lainnya di tanal batas hingga masuk sejauh 1,8 km di

dalam wilayah Ekuador. Hal tersebut mengakibatkan pecah krisis antara Kolombia dan negara tetangganya. Presiden Ekuador Rafael Correa, mengusir duta besar Kolombia dan menarik duta besarnya untuk Kolombia.

Presiden Venezuela, Hugo Chavez mengabarkan pemutusan hubungan diplomatik negaranya dengan Kolombia dan menarik duta besarnya dari Bogota. Keputusan itu diambil sebagai respon dari tuduhan bahawa dirinya sebagai pemberi dana FARC dan sikap protes atas pelanggaran kedaulatan terhadap Ekuador. Presiden Chavez menyebut tudingan para petinggi Kolombia itu sebagai klaim tidak bertanggung jawab. Hugo Chavez menegaskan bahwa Amerika Serikat merupakan pihak di balik Kolombia dan hendak mengontrol Kolombia di Amerika Latin, serta memanfaatkan Israel dan Kolombia untuk menciptakan perpecahan di Timur Tengah dan Amerika Latin.⁴

Chavez memerintahkan pasukannya yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja ke wilayah perbatasan dengan Kolombia untuk mengingatkan Presiden Alvaro Uribe apabila melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukannya terhadap Ekuador, hal itu dapat diartikan penyerangan terhadap kedaulatan Venezuela dan dapat memicu perang.

Pasca serangan tentara Kolombia ke kamp milisi sayap kiri FARC, hubungan Venezuela dan Kolombia nyaris berada dalam kondisi perang. Di masa itu, hubungan diplomatik Caracas-Bogota terputus. Namun, mengingat

⁴ "Pemutusan Hubungan Venezuela-Kolombia",

Venezuela memiliki posisi yang berpengaruh di kawasan Amerika Latin, dinginnnya hubungan Caracas-Bogota berujung pada dikucilkannya Kolombia dari pergaulan regional.

Perang di Kolombia berubah menjadi konflik internasional. Venezuela dan Ekuador bisa saja memandang gerakan gerilya FARC (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*) sebagai pihak yang legitim. Di lain pihak Kolombia merupakan sekutu strategis dan paling setia Amerika Serikat di Amerika Latin.

D. Pokok Permasalahan

Dari data di atas dapat dicari pokok permasalahan yang ada yaitu, mengapa Venezuela memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kolombia pasca penyerangan kamp milisi sayap kiri FARC oleh tentara Kolombia?

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan tentang keputusan hubungan diplomatik Venezuela terhadap Kolombia pasca serangan tentara Kolombia ke kamp milisi Sayap kiri FARC, maka penulis akan menggunakan teori yang dianggap tepat dan mampu menjembatani, serta memudahkan kita dalam mempelajari dan menganalisa permasalahan tersebut. Kerangka dasar teori yang digunakan

Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory)

Salah satu teori tentang pengambilan keputusan dan kebijakan politik luar negeri dikemukakan oleh Willian D. Coplin, yang menyatakan:

To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makers' state. The second is the economy and military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to the other state in system.⁵

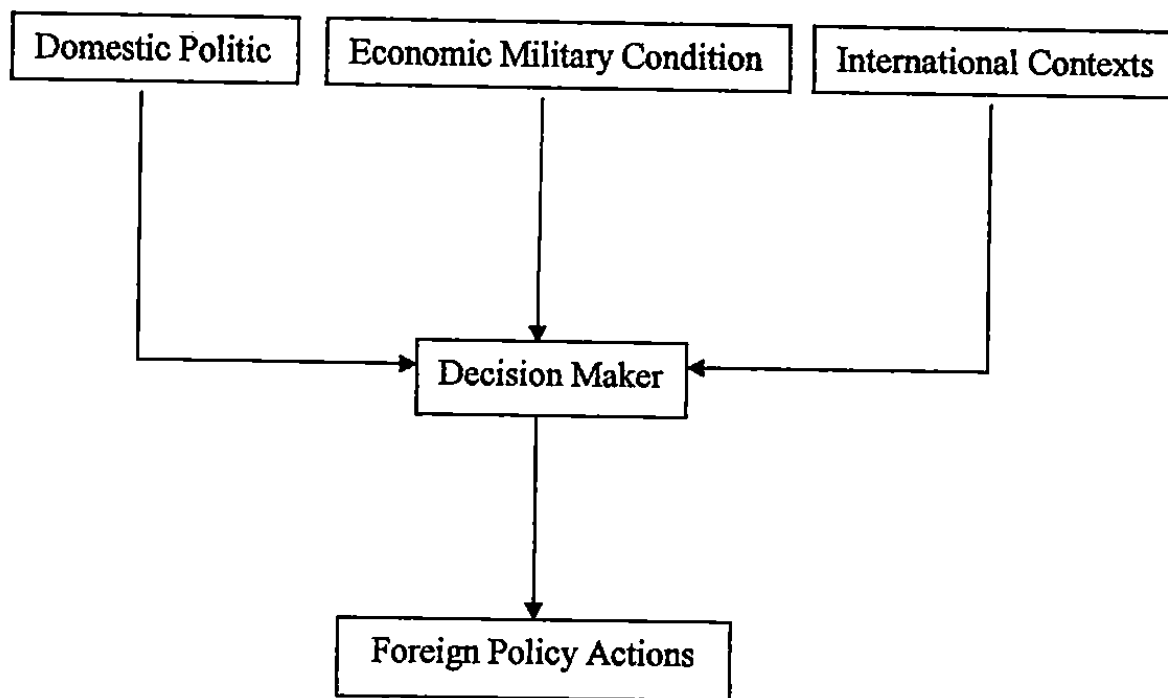
Apabila kita akan menganalisa kebijakan politik luar negeri suatu negara kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membentuk kebijaksanaan politik luar negeri. Dan salah besar jika menganggap para pengambil kebijaksanaan luar negeri bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijaksanaan luar negeri menurut coplin:

1. Kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya.
2. Situasi ekonomi dan militer negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.

⁵ William D. Coplin, *Foreign Policy Decision Making: Theory and Practice*, Columbia University Press, 1974, hal. 10.

3. Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri) serta pengaruh negara-negara lain yang relevan dengan yang dihadapi.

Proses pengambilan keputusan menurut William D. Coplin



Sumber : Prospektif volume 4 no. 4, 1992.

Situasi Politik Domestik

Situasi politik domestik, termasuk didalamnya faktor budaya sebagai dasar tingkah laku, dimana para perencana kebijakan luar negeri biasanya bekerja mengacu pada pengalaman-pengalaman di masa lampau. Kebijakan yang dihasilkan akan berasal dari pertimbangan tradisi atau budaya yang tertahan secara mendalam dalam sejarah nasional yang merupakan lanjutan dari kebijakan terdahulu, kemudian diketengahkan dalam pengalaman

sekarang. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor

dalam negeri, meliputi para birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan opini publik yang disalurkan melalui partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan.

Situasi politik dalam negeri berjalan dengan tentunya akan sangat mendukung dalam melahirkan kebijakan demi tercapainya tujuan-tujuan negara dan kepentingan nasionalnya (*national interest*).

Hasil akhir pemilu di Venezuela pada 6 Desember 1998 menempatkan Chavez sebagai pemenang dengan jumlah suara sebesar 56.2 persen (3,673,685 suara). Setelah memenangkan kursi kepresidenan, program pertama Chavez adalah menggelar referendum pada 25 April 1999 untuk menyusun sebuah dewan konstituante. Para kandidat dari partai politik berpartisipasi dalam pemilihan tersebut untuk mengisi 130 kursi di Majelis Konstituante. Majelis ini secara resmi terpilih pada 25 Juli 1999, para anggota mulai bersidang pada Agustus dan Desember untuk memikirkan dan menyusun konstitusi baru. Maka secara resmi konstitusi 1999 tersebut menggantikan konstitusi 1961.

Di bawah Dewan Konstituante yang baru tersebut, pemerintahan baru berhasil mengesahkan sebuah konstitusi baru yang menjamin dihormatinya hak-hak sosial, politik, ekonomi dan budaya rakyat Venezuela.⁶ Di bawah naungan konstitusi baru ini, Chavez kemudian melakukan pemilu pada 30 Juli 2000, yang merupakan pemilu pertama dengan ketentuan undang-undang

⁶

<http://www.melawati.blogspot.com/2010/02/>

baru. Konstusi juga mencantumkan bahwa negara menjamin kesehatan dan perumahan bagi rakyat Veneuela.

Pemilu tahun 2000 disebut sebagai *mega-election* karena rakyat memilih lembaga eksekutif dan yudikatif pada tingkat pusat dan daerah secara bersamaan. Dalam pemilu ini, Chavez mendapat kmenangan mutlak yaitu 59,76% melawan kelompok-kelompok yang menentang Chavez. Dalam pemilu presiden Chavez menghadapi 2 lawan, yaitu mantan pimpinan partai AD sekaligus mantan mayor Caraca Caludio Fermin (mendapat 37,52%) dan teman seperjuangan Chavez konspirasi kudeta 2000 Letnan Kolonel Fransisco Arias Cardenas (mendapat 2,72%).

Presiden Hugo Chavez memiliki semanagat besar untuk merombak sistem pemerintahan. Platform utamanya adalah meminta Majelis Konstitusi Nasional/*National Constituent Assembly* (ANC) untuk bersidang guna menyusun konstusi baru untuk Venezuela dan menganggap sistem politik dan pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi tahun 1961 mengasingkan rakyat dari pemerintahan. Hingga rakyat menyetujui konstusi yang diusulkan ANC melalui referendum pada 15 Desember 1999 dan berfungsi sejak 20 Desember 1999.⁷

Keberhasilan pemerintahan sosialis Venezuela di bawah Hugo Chavez yang terpilih menjadi presiden saat pemilu 1998, merupakan salah satu faktor yang mendorong berkembangnya paham sosialis baru di Amerika Latin. Keberhasilan presiden Hugo Chavez baik di dalam maupun di luar negeri

⁷ Nurani Setyaningsih, *Hugo Chavez: Kekuasaan, Fasilitas, dan Fasilitas* (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 10.

telah membuatnya menjadi figur kebanggaan bagi rakyat Amerika Latin yang mendambakan perubahan. Reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan Chavez dan usaha pemerintahannya dalam mengentaskan kemiskinan, telah menimbulkan dukungan penuh rakyat terhadap Chavez.

Situasi Ekonomi dan Militer

Termasuk faktor geografis yang mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan dilihat dari salah satu prinsip yang mendasari pemilihan tujuan kebijakan luar negeri, yaitu kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran negara, letak geografis suatu negara menjadi salah satu modal dalam hubungan dengan pusat industri dunia, pertimbangan sumber daya alam, iklim, topografi, ukuran yaitu luas dan sempitnya wilayah suatu negara yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi penempatan dan penyebaran militer untuk pertahanan dan keamanan suatu negara. Sedangkan untuk iklim dilihat dari tingkat kesegaran iklim yang mampu mendukung kekuatan fisik. Dan untuk topografi akan berkaitan dengan masalah keadaan perbatasan dengan wilayah negara lain.

Kapabilitas ekonomi dan militer juga berperan sebagai penyangga untuk mengimplementasikan tujuan eksternal suatu negara. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi yang dimiliki suatu negara, maka para pembuat keputusan dapat melihat apakah kebijakan yang diambil akan

Begitu pula dengan kemampuan militer yang merupakan instrumen penting dari aspek keamanan. Dengan mempertimbangkan kondisi militer dalam negeri dapat dijadikan acuan untuk menentukan langkah dalam mengambil kebijakan oleh para pembuat kebijakan.

Venezuela sebagai salah satu negara pendiri OPEC dan penghasil minyak terbesar ke-5 di dunia, bahkan dikatakan memiliki cadangan minyak terbesar mencapai 1,3 triliun barrel, yang berarti jumlah ini sama dengan seluruh jumlah persediaan minyak di dunia. Melimpahnya minyak Venezuela tentu saja menjadikannya bahan bakar kesejahteraan bagi rakyat. Di bawah pemerintahan Chavez hal pertama yang ia lakukan adalah melawan neoliberalisme dengan menasionalisasi pertambangan dari perusahaan-perusahaan internasional seperti Royal Dutch Shell, Chevron Texaco Coopr, Exxon Mobil Coopr, dan Repsol YPF. Pemerintah Chavez juga merenasionalisasi PDVSA (Petroleos de Venezuela, perusahaan minyak negara), dan mengalokasikan lebih dari 50% keuntungannya untuk misiones, yaitu program-program bagi kesejahteraan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis.

Intervensi negara Sosialis memprioritaskan kebutuhan paling mendasar dari rakyat. Inilah tipe intervensi terkendali dan terencana yang dilaksanakan oleh Hugo Chavez, pada saat bersamaan memaksimalkan demokrasi, kesadaran politik, dan partisipasi rakyat dalam mengelola urusan mereka sendiri. Perusahaan yang telah dinasionalisasi di Venezuela, seperti perusahaan komunikasi utama (CANTV) industri minyak (SIDOR) dan

bank-bank utama di Venezuela (Bank Venezuela), merupakan perusahaan-perusahaan yang sangat menguntungkan. Dalam kasus CANTV, nasionalisasinya menghabiskan uang Venezuela sebesar kira-kira \$1,6 milyar; walau demikian, setelah setahun penuh beroperasi perusahaan ini menciptakan profit bersih sebesar \$400 juta. Dengan laju seperti ini, Venezuela akan menutupi investasi awalnya dalam tiga tahun pengoperasiannya. Sumber daya yang sebelumnya mengalir ke kantung kaum kaya atau diinvestasikan ke luar negeri (capital flight), kini digunakan oleh pemerintahan Hugo Chavez untuk mendanai proyek-proyek kesehatan publik yang sangat bermanfaat bagi rakyat yang paling membutuhkan.⁸

Militer venezuela memiliki karakteristik yang beda dengan personil militer lainnya di kawasan Amerika Latin, diantaranya militer Venezuela sangat dipengaruhi oleh filosofi Simon Bolivar, figur yang paling terhormat di Amerika Latin dalam perjuangan pembebasan nasional dari penjajahan Spanyol.

Ketika partai-partai tradisional kaum oposisi atas dukungan Amerika Serikat menggerakkan kudeta untuk melawan Presiden Hugo Chavez pada tahun 2002, militer Venezuela dan rakyat pendukungnya telah mengembalikan Hugo Chavez dari jabatannya.

Personil militer Venezuela meliputi angkatan darat 34.000 anggota, angkatan laut 18.000 anggota, angkatan udara 7.000 anggota dan FAC 23.000. untuk meningkatkan kemampuan militer demi terciptanya pertahanan dan

⁸ "Intervensi Ekonomi Negara Kapitalis vs Sosialis", <http://www.nefos.org/?q=node/47>, diakses pada 18 Februari 2010.

keamanan negara, Venezuela juga memiliki kapal selam Lupo: 6 buah, Guppy-II: 1 buah, Destroyer: 2 buah, Constitutions-Class: 6 buah, German Type-209: 2 buah, Project 636 Kilo-class: 6 buah, Project 677 Amur-class: 4 buah, Kapal Induk: 4 buah serta 24 jet tempur Sukhoi, 50 helikopter dan 100.000 senapan serang kalashnikov.

Jika dikaitkan dengan situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan dalam hal ini dikaitkan dengan letak geografis Venezuela yang berbatasan langsung dengan Kolombia. Operasi militer Kolombia terhadap gerakan separatis di perbatasan Venezuela dan Ekuador, hingga memasuki wilayah ekuador tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Ekuador sebagai negara mendeka. Untuk itu, Venezuela mengantisipasi hal tersebut terjadi di wilayah teritorialnya. Penarikan duta besar Venezuela di Kolombia serta pengiriman pasukan ke wilayah perbatasan adalah terkait keamanan dan pertahanan serta sikap protes pemerintah Venezuela terhadap Kolombia atas tuduhan pendanaan Hugo Chavez terhadap kelompok separatis FARC.

Konteks Internasional

Yang dimaksud dengan konteks internasional yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain di dalam sistem internasional. Dimana secara tradisional, kondisi dari sistem internasional akan menentukan bagaimana suatu negara berperilaku serta dapat diartikan sebagai produk

berbagai keputusan dan tindakan politik luar negeri pada masa lampau, sekarang, dan akan datang yang dapat diantisipasi.

Tidak adanya peran besar organisasi regional negara-negara Amerika Latin terhadap ketegangan politik Venezuela-Kolombia membuat ketegangan tidak dapat dihindari dan terjadi terus-menerus.

Saat ini organisasi regional di Amerika Selatan sedang tidak satu visi. Di satu sisi, negara-negara amerika latin terikat dengan OAS (Organization of American States), di sisi lain juga mereka membentuk Union of South American Nations (UNASUR). UNASUR sendiri adalah gabungan dari negara-negara yang tergabung dalam Andean Community of Nations (CAN) yaitu Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru dengan Southern Common Market (mercosour) yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay dan Venezuela sebagai negara anggota inti.

Diluar kesepakatan-kesepakatan regional tersebut, Hugo chavez juga membuat aliansi alternatif bernama Bolivarian Alliance for the Americas (ALBA), ALBA sendiri saat ini beranggotakan 8 negara setelah Honduras mengundurkan diri, Setelah presiden Manuel Zelaya yang terpilih secara demokratis dikudeta militer pro Amerika Serikat. Negara-negara yang menjadi anggota ALBA adalah Antigua dan Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominica, Ekuador, Nikaragua, Saint Vincent, dan Venezuela.

Selain itu, usaha Chavez untuk meningkatkan persatuan di antara negara-negara Amerika Latin dengan mengabaikan tawaran persatuan ini di

kredit jangka panjang dan murah, telah menyebabkan Venezuela memiliki posisi yang kuat dalam percaturan politik regional.

Semua kebijakan Chavez yang berlangsung di Venezuela dan kerjasamanya dengan beberapa negara lain di Amerika Latin seperti Kuba dan Bolivia tentu saja sangat bertentangan dengan kebijakan-kebijakan dalam "*Washington Consensus*". Seperti halnya melipat gandakan anggaran sosial, yang oleh IMF disebut sebagai pemborosan, nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang oleh IMF dianjurkan untuk diprivatisasi, aturan-aturan ketat bagi investasi dan liberalisasi, serta pajak progresif, yang oleh IMF dianjurkan untuk dibuat fleksibel dan bebas.

Jika dikaitkan dengan konteks internasional dalam hal ini dikaitkan dengan negara tujuan politik luar negeri Venezuela yaitu Ekuador. Ekuador adalah mitra dekat Venezuela yang mempunyai kesamaan ideologi, dibandingkan Kolombia yang dekat dan menjadi sekutu Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.

Sejak tahun 2000 hingga sekarang, Washington telah memberikan dana sekitar 4 miliar USD kepada pemerintah Kolombia untuk memerangi milisi FARC. Amerika Serikat mempersenjatai sekutunya di Amerika Latin ini dengan berbagai persenjataan dan perlengkapan militer paling modern. Tentu saja langkah Amerika Serikat itu menyulut kekhawatiran negara-negara Amerika Latin yang kontra dengan Amerika Serikat. Hal ini membuat posisi Kolombia terkucilkan di wilayah Amerika Latin

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian dan analisa diatas maka dapat diambil keputusan sementara yaitu pemutusan hubungan diplomatik Venezuela terhadap Kolombia pada di bawah pemerintahan Hugo Chavez pasca serangan tentara kolombia ke kamp milisi sayap kiri FARC didasarkan oleh beberapa alasan:

1. Sebagai bentuk solidaritas dan protes pemerintah Venezuela atas pemasukan wilayah Ekuador oleh militer Kolombia.
2. Reaksi terhadap tuduhan pemerintah Kolombia terhadap Hugo Chavez yang mendanai milisi sayap kiri FARC.

G. Jangkauan Penulisan

Pembatasan penulisan bermaksud supaya obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji dan tidak terjadi penyimpangan. Dengan adanya batas-batas kajian untuk menjadi pedoman dan mencegah timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan.

Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan batasan waktu dari tahun 2004 sejak Penangkapan salah satu petinggi FARC, Rodrigo Granda Alvaro hingga 2008, ketika tentara Kolombia menyerang kamp milisi sayap kiri FARC, hingga terjadinya pemutusan hubungan diplomatik dan diakhiri dengan peristiwa normalisasi hubungan antara Venezuela dengan Kolombia

H. Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan metode *content analysis* dan *historical analysis* melalui jurnal, majalah, surat kabar, buku, dan internet sebagai sumber yang dianggap relevan dengan penulisan ini. Penulisan ini menggunakan perspektif Venezuela sebagai dasar penulisan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini disusun dalam lima bab dengan berbagai sub topik pembahasan:

- Bab I. Alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoritis, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Akan memberi penjelasan mengenai kondisi politik dalam negeri, ekonomi dan militer Venezuela di bawah pemerintahan Hugo Chavez. Serta persebaran sosialis di kawasan Amerika Latin.
- Bab III. Akan menjelaskan tentang dinamika hubungan antara Venezuela dengan Kolombia, mencakup sejarah hubungan kedua negara dan konflik-konflik yang terjadi antar kedua negara terutama terkait masalah FARC.
- Bab IV. Akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pemjutusan hubungan diplomatik Venezuela terhadap Kolombia pasca penyerangan militer Kolombia terhadap FARC

Bab V. Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian mengenai ketegangan politik antara Venezuela-Kolombia terkait masalah EAPC hingga penutupan hubungan